

Diplomasi Islam Nusantara Berbasis Pesantren: Peran Strategis Nahdlatul Ulama dalam Agenda Perdamaian Global

M. Sholahul 'Am Noto Buwono¹, Imam Syafi'i², Khotimah Suryani³

^{1,2,3}Program Doktorat Studi Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
E-mail: 2505301022@mhs.unisda.ac.id¹, isa.tamyes@gmail.com², khotimah@unisda.ac.id³

Article History:

Received: 09 Mei 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 08 Juli 2026

Keywords: Islam Nusantara;
Pesantren Diplomacy;
Nahdlatul Ulama; Religious
Diplomacy; Global
Peacebuilding

Abstract: *This article examines pesantren-based Islam Nusantara diplomacy and the strategic role of Nahdlatul Ulama (NU) in the global peace agenda. Using a qualitative approach through library research and document analysis, the study explores how pesantren function not merely as traditional Islamic educational institutions, but as social, cultural, and epistemic foundations for religious diplomacy. The findings show that pesantren serve as laboratories for the formation of moderate Islamic values, including tawasut, tawazun, tasamuh, and taadul, which are then articulated by NU through cultural diplomacy, institutional forums such as the R20, PCINU diaspora networks, and interfaith engagement. The study argues that NU's diplomacy operates through a hybrid religious diplomacy model that combines pesantren values, organizational legitimacy, global forums, grassroots networks, and digital narratives. This model contributes to global peacebuilding by offering an alternative Islamic narrative rooted in moderation, local wisdom, moral authority, and social coexistence. The article also highlights the need to strengthen pesantren capacity in intercultural communication, digital literacy, peace studies, and international networking to ensure more sustainable and measurable contributions to global peace.*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika geopolitik kontemporer, agama tidak lagi dapat dipahami semata sebagai urusan privat atau variabel domestik yang terpisah dari hubungan internasional. Agama justru semakin hadir sebagai kekuatan sosial, kultural, dan politik yang memengaruhi pembentukan identitas kolektif, hubungan lintas komunitas, serta agenda perdamaian global. Perubahan ini tampak dalam meningkatnya perhatian terhadap peran komunitas keagamaan dalam merespons konflik berbasis identitas, polarisasi sosial, ekstremisme kekerasan, dan krisis kepercayaan terhadap tata kelola global. Indonesia menempati posisi penting dalam konteks ini karena menjadi negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, sekitar 242 juta jiwa atau 87% dari total penduduk (Pew Research Center, 2024).

Posisi demografis tersebut memberi Indonesia modal simbolik yang besar dalam

menawarkan model keberagamaan yang moderat, plural, dan berakar pada pengalaman sosial masyarakat majemuk. Namun, modal tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan diplomatik tanpa adanya institusi, jaringan, dan narasi yang mampu menerjemahkan nilai keagamaan ke dalam praktik sosial dan forum global. Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki posisi strategis karena tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang memiliki basis sosial luas, tradisi keilmuan pesantren, dan jaringan transnasional. Melalui gagasan Islam Nusantara, NU menghadirkan corak keislaman yang menekankan moderasi, toleransi, keseimbangan, penghargaan terhadap budaya lokal, dan komitmen terhadap kemaslahatan umum.

Secara konseptual, Islam Nusantara dapat dipahami sebagai ekspresi keislaman yang tumbuh melalui proses historis panjang antara ajaran Islam dan budaya lokal Nusantara. Ia bukan bentuk pemisahan dari Islam universal, melainkan cara keberagamaan yang menempatkan nilai Islam dalam konteks sosial, budaya, dan kebangsaan Indonesia. Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa Islam Nusantara berkaitan erat dengan tradisi pluralisme, toleransi, akulturasi, dan moderasi beragama yang dikembangkan dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara. Karena itu, Islam Nusantara memiliki potensi untuk dibaca bukan hanya sebagai wacana teologis lokal, tetapi juga sebagai sumber daya *soft power* yang dapat dikomunikasikan dalam arena diplomasi keagamaan global (Syamsurijal et al., 2022; Marjani, 2023; Muttaqin et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, pesantren menempati posisi penting sebagai basis sosial, kultural, dan epistemik dari diplomasi Islam Nusantara. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan Islam tradisional, melainkan ruang reproduksi otoritas keagamaan, pembentukan etika sosial, kaderisasi ulama, dan penguatan jejaring masyarakat. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada 2022 terdapat 37.626 pesantren yang menaungi lebih dari empat juta santri di Indonesia (Kemenag, 2024; Satu Data Indonesia, 2024). Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa pesantren merupakan infrastruktur sosial keagamaan yang sangat besar dan berpengaruh dalam pembentukan orientasi keberagamaan masyarakat. Dalam konteks diplomasi, pesantren dapat dipahami sebagai basis pembentukan aktor, nilai, dan jejaring yang memungkinkan Islam Nusantara bergerak dari ruang lokal menuju ruang global.

Urgensi kajian ini semakin kuat setelah munculnya forum keagamaan internasional yang diinisiasi NU, terutama *Religion of Twenty* (R20) dalam rangkaian Presidensi Indonesia pada *Group of Twenty* (G20) tahun 2022 (Center for Shared Civilizational Values, 2022). R20 menandai perubahan penting dalam cara agama ditempatkan dalam tata kelola global, yaitu bukan semata sebagai sumber masalah, melainkan sebagai sumber solusi moral bagi konflik, ketidakadilan, dan fragmentasi sosial. Forum ini juga menunjukkan bahwa aktor keagamaan non negara dapat memasuki ruang diplomasi global melalui otoritas moral, jaringan sosial, dan kemampuan membangun dialog lintas agama. Setelah R20, inisiatif dialog antarbudaya dan antaragama juga berlanjut melalui forum regional seperti ASEAN *Intercultural and Interreligious Dialogue Conference* pada 2023 (ASEAN IIDC, 2023; Salma, 2023).

Secara teoritik, fenomena tersebut dapat dibaca melalui pendekatan *public diplomacy*, *soft power*, dan *faith-based peacebuilding*. Dalam perspektif *soft power*, pengaruh tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga melalui daya tarik nilai, budaya, legitimasi moral, dan kredibilitas sosial (Schliesser, 2024). Sementara itu, kajian *faith-based peacebuilding* menempatkan aktor keagamaan sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk membangun rekonsiliasi, meredam konflik identitas, dan memperkuat kohesi sosial melalui bahasa moral yang mudah diterima komunitas beriman (Kwuelum, 2024). Kajian tentang *interreligious peacebuilding* oleh Driessen (2025) juga menegaskan bahwa keterlibatan komunitas

keagamaan menjadi semakin penting ketika konflik kontemporer bergerak dalam bentuk yang kompleks, emosional, dan berakar pada identitas.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran NU dalam diplomasi keagamaan, moderasi Islam, dan dialog antaragama. Ridwan et al. (2024) dan Suaedy et al. (2026) menunjukkan bahwa forum tersebut menjadi instrumen penting bagi NU untuk menghubungkan agama dengan agenda perdamaian dan tata kelola global. Kajian lain juga menempatkan NU sebagai aktor strategis dalam politik luar negeri Indonesia dan sebagai penggerak *cultural diplomacy* melalui paradigma Islam Nusantara (Utama, 2024; Muttaqin et al., 2025). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih lebih banyak menyoroti NU pada level organisasi pusat, forum internasional, atau jaringan diaspora. Kajian yang secara khusus menempatkan pesantren sebagai basis strategis diplomasi Islam Nusantara masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menjadi celah akademik yang penting untuk dikaji. Jika diplomasi Islam Nusantara hanya dibaca melalui forum formal seperti R20 atau melalui kebijakan organisasi pusat NU, maka peran pesantren sebagai sumber nilai, kader, otoritas, dan legitimasi sosial akan kurang terlihat. Padahal, pesantren merupakan ruang tempat nilai Islam Nusantara ditanamkan, diwariskan, dan diartikulasikan dalam praktik sosial. Dengan kata lain, pesantren tidak selalu tampil sebagai aktor diplomatik formal, tetapi menjadi fondasi kultural yang memungkinkan NU membangun kredibilitas dalam diplomasi perdamaian. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menempatkan pesantren sebagai basis *hybrid religious diplomacy* yang menghubungkan pendidikan keagamaan, tradisi lokal, jaringan sosial, dan forum global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Nahdlatul Ulama dalam diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren serta kontribusinya terhadap agenda perdamaian global. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pesantren menjadi basis nilai dan kaderisasi dalam diplomasi Islam Nusantara. Kedua, melalui mekanisme apa NU mengartikulasikan Islam Nusantara dalam forum dan jaringan perdamaian global. Ketiga, apa tantangan dan prospek diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren dalam menghadapi dinamika politik keagamaan global. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang diplomasi keagamaan, *soft power* Islam Indonesia, dan peran pesantren dalam *peacebuilding* global.

LANDASAN TEORI

1. Islam Nusantara sebagai Basis Nilai Diplomasi Keagamaan

Islam Nusantara merupakan konsep keislaman yang lahir dari perjumpaan panjang antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal Nusantara (Putra, 2020). Konsep ini tidak menempatkan budaya sebagai lawan agama, tetapi sebagai ruang historis tempat nilai Islam diartikulasikan secara kontekstual (Damayanti, 2025; Ilyas et al., 2025; Widadi & Razi, 2025). Dalam perspektif ini, praktik keislaman masyarakat Nusantara dibentuk melalui proses dakwah yang akomodatif, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Karena itu, Islam Nusantara tidak dapat dipahami hanya sebagai identitas lokal, tetapi sebagai paradigma keagamaan yang menekankan keseimbangan antara normativitas Islam dan realitas sosial budaya masyarakat.

Secara konseptual, Islam Nusantara bertumpu pada nilai *tawasut*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* (Syamsurijal et al., 2022; Hanipudin et al., 2023). Keempat nilai tersebut menjadi fondasi etis bagi corak keberagaman yang moderat, inklusif, dan terbuka terhadap keragaman. Marjani (2023) menunjukkan bahwa perkembangan Islam Nusantara berakar pada gagasan pribumisasi

Islam dan terus bergerak menjadi konsep yang menegaskan pluralisme, toleransi, serta prinsip *rahmatan lil alamin* dalam kehidupan sosial keagamaan Indonesia. Dengan demikian, Islam Nusantara dapat diposisikan sebagai sumber nilai yang relevan bagi diplomasi keagamaan, terutama ketika dunia menghadapi konflik identitas, ekstremisme, dan polarisasi berbasis agama.

Dalam konteks diplomasi, Islam Nusantara berfungsi sebagai *cultural resource* yang memberi daya tarik moral bagi Indonesia dan Nahdlatul Ulama (NU). Nilai-nilai yang dikandungnya dapat dikomunikasikan kepada masyarakat internasional sebagai model Islam yang tidak konfrontatif, tidak eksklusif, dan tidak terlepas dari konteks kebudayaan. Karena itu, Islam Nusantara dapat dibaca sebagai bagian dari *soft power* keagamaan, yaitu kemampuan membangun pengaruh melalui nilai, budaya, kredibilitas moral, dan legitimasi sosial, bukan melalui tekanan politik atau kekuatan material. Muttaqin et al. (2025) menunjukkan bahwa Islam Nusantara digunakan sebagai paradigma *soft power* untuk merespons Islamofobia dan memperkuat citra Islam Indonesia sebagai Islam yang damai dan adaptif.

2. Pesantren sebagai Basis Sosial Epistemik Islam Nusantara

Pesantren merupakan institusi utama yang menopang keberlanjutan Islam Nusantara. Di dalam pesantren, nilai moderasi, penghormatan terhadap tradisi, etika sosial, dan pemahaman keagamaan berbasis kitab kuning diwariskan melalui relasi keilmuan antara kiai, santri, dan komunitas (Burga & Damopolii, 2022; Nasution et al., 2024). Dengan posisi tersebut, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan otoritas keagamaan dan karakter sosial. Pesantren membentuk cara pandang keagamaan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teks, tetapi juga pada kemampuan membaca realitas sosial secara bijaksana.

Pesantren dapat dipahami sebagai *epistemic community*, yaitu komunitas yang memproduksi, menjaga, dan menyebarkan pengetahuan keagamaan tertentu. Pengetahuan tersebut tidak berhenti pada ruang lokal pesantren, tetapi bergerak melalui jaringan alumni, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, media digital, dan forum internasional. Di sinilah pesantren memiliki relevansi diplomatik. Diplomasi Islam Nusantara tidak muncul secara tiba-tiba di forum global, tetapi berakar pada tradisi pesantren yang telah lama membentuk etika keberagamaan damai, akomodatif, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Kajian tentang *santri diplomacy* memperkuat posisi tersebut. Song & Utama (2025) menunjukkan bahwa santri dapat berperan sebagai duta budaya informal, terutama dalam konteks hubungan lintas negara seperti Indonesia dan China. Dalam situasi ketika ekspresi keagamaan formal memiliki keterbatasan, santri tetap dapat menjalankan peran diplomatik melalui jalur budaya, pendidikan, jejaring akademik, dan komunitas diaspora. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa diplomasi berbasis pesantren tidak selalu bekerja melalui kanal resmi negara, tetapi juga melalui praktik keseharian, pertukaran pengetahuan, dan representasi kultural di ruang transnasional.

3. Diplomasi Publik, *Soft Power*, dan Aktor Keagamaan Non-Negara

Diplomasi publik pada mulanya dipahami sebagai upaya negara untuk memengaruhi publik internasional melalui komunikasi, budaya, pendidikan, dan pertukaran nilai. Namun, perkembangan hubungan internasional kontemporer menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi dimonopoli oleh negara. Organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, komunitas diaspora, tokoh

agama, dan jaringan masyarakat sipil turut memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, membangun dialog, serta memengaruhi agenda global (Athoillah et al., 2024; Ridwan et al., 2024; Muttaqin et al., 2025). Dalam konteks ini, NU dapat diposisikan sebagai aktor keagamaan non negara yang memanfaatkan nilai Islam moderat sebagai sumber daya diplomatik.

Teori *soft power* menjadi relevan karena menjelaskan bagaimana pengaruh dapat dibangun melalui daya tarik nilai, budaya, dan legitimasi, bukan melalui paksaan. Dalam kasus NU, daya tarik tersebut tidak hanya berasal dari doktrin keagamaan, tetapi juga dari reputasi historisnya sebagai organisasi Islam besar yang memiliki akar pesantren, tradisi keilmuan, dan komitmen terhadap kebangsaan. Nubowo (2023) menunjukkan bahwa NU dan Muhammadiyah berperan sebagai aktor non negara dalam diplomasi *soft power* Islam Indonesia pasca Orde Baru dengan memobilisasi sumber daya kelembagaan, jaringan sosial, dan narasi Islam moderat di panggung global.

Melalui perspektif ini, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi publik keagamaan. Pesantren menyediakan basis nilai dan kader, NU menyediakan struktur organisasi dan legitimasi kelembagaan, sedangkan forum internasional seperti R20 dan jaringan PCINU menjadi medium artikulasi global. Hubungan ketiganya menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara tidak bersifat tunggal, tetapi bergerak melalui banyak jalur. Ia mencakup diplomasi budaya, diplomasi kelembagaan, diplomasi diaspora, dan diplomasi akar rumput.

4. *Faith Based Peacebuilding* dan Perdamaian Global

Konsep *faith-based peacebuilding* menempatkan agama sebagai sumber etika publik yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian (Kwuelum, 2024; Odak, 2024; Driessen, 2025). Dalam pendekatan ini, agama tidak hanya dilihat sebagai faktor pemicu konflik, tetapi juga sebagai sumber legitimasi moral, solidaritas sosial, rekonsiliasi, dan transformasi konflik. Aktor keagamaan memiliki keunggulan tertentu karena mampu berbicara dengan bahasa moral yang dekat dengan komunitas beriman, memiliki jaringan sosial yang luas, serta sering kali dipercaya oleh masyarakat pada saat institusi politik mengalami krisis legitimasi.

Keterlibatan aktor keagamaan penting dalam merespons konflik modern yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga emosional, simbolik, dan berbasis identitas (Adlan, 2023). Dialog antaragama, pendidikan perdamaian, rekonsiliasi sosial, dan kerja sama lintas komunitas menjadi bagian dari strategi untuk meredam prasangka serta membangun kepercayaan. Sehingga pesantren NU dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki kapasitas *peacebuilding* karena menggabungkan otoritas keilmuan, kedekatan sosial dengan masyarakat, dan jejaring transnasional.

R20 menjadi contoh penting bagaimana NU membawa agama ke dalam ruang diskusi global sebagai sumber solusi. Forum ini digagas oleh NU dalam konteks Presidensi Indonesia pada *Group of Twenty* (G20) tahun 2022 dan diarahkan untuk mempertemukan pemimpin agama dari berbagai tradisi dalam membahas kontribusi agama terhadap persoalan global (Center for Shared Civilizational Values, 2022). Forum tersebut dimaksudkan untuk memastikan agama berfungsi sebagai sumber solusi yang nyata dan dinamis bagi tantangan abad ke 21.

5. Diplomasi Islam Nusantara sebagai *Hybrid Religious Diplomacy*

Berdasarkan konsep di atas, digunakan kerangka *hybrid religious diplomacy* untuk membaca peran strategis NU dalam agenda perdamaian global. Kerangka ini memandang diplomasi Islam Nusantara sebagai praktik diplomasi yang memadukan dimensi kultural, keagamaan, kelembagaan, dan akar rumput. Ia disebut *hybrid* karena tidak sepenuhnya berada dalam diplomasi negara, tetapi juga tidak sepenuhnya bersifat informal. NU bergerak di antara ruang masyarakat sipil, pesantren, forum multilateral, jaringan diaspora, dan kerja sama dengan negara.

Dalam kerangka ini, pesantren berfungsi sebagai basis produksi nilai dan kaderisasi. NU berfungsi sebagai aktor kelembagaan yang mengartikulasikan nilai tersebut pada level nasional dan global. R20 menjadi kanal diplomasi kelembagaan, sedangkan PCINU dan jaringan santri diaspora menjadi kanal diplomasi akar rumput. GIGA (2023) menunjukkan bahwa agenda Islam moderat untuk perdamaian ditandai oleh kolaborasi aktor negara dan non negara dalam membangun citra Indonesia sebagai model Islam moderat di tingkat global. Temuan ini memperkuat posisi NU sebagai aktor penting dalam diplomasi Islam Indonesia, meskipun tetap perlu dibaca secara kritis karena wacana moderasi juga menghadapi tantangan politik dan sosial di dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*document analysis*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran konsep, konstruksi argumen, dan pembacaan kritis terhadap praktik diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren, bukan pada pengukuran statistik atau pengumpulan data lapangan (Creswell & Poth, 2023). Objek kajian penelitian ini adalah wacana dan praktik diplomasi Islam Nusantara yang berkaitan dengan peran pesantren dan Nahdlatul Ulama dalam agenda perdamaian global. Kajian ini dianalisis melalui perspektif diplomasi keagamaan, diplomasi publik (*public diplomacy*), daya lunak (*soft power*), dan pembangunan perdamaian berbasis agama (*faith-based peacebuilding*).

Data penelitian diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan tema kajian. Sumber yang digunakan meliputi dokumen resmi Nahdlatul Ulama, publikasi R20 tahun 2022, hasil Mukhtamar NU ke 34, pernyataan resmi PBNU, informasi kelembagaan terkait jaringan PCINU, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, laporan lembaga riset, dan publikasi kebijakan yang membahas Islam Nusantara, pesantren, NU, diplomasi keagamaan, dan perdamaian global. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kebaruan data, kredibilitas penerbit, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian (Ahmed et al., 2025; Almusaed et al., 2025). Literatur klasik tetap digunakan sejauh memiliki kontribusi teoretis yang kuat, sedangkan literatur mutakhir diprioritaskan untuk membaca perkembangan terbaru diplomasi Islam Nusantara setelah menguatnya forum R20.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018). Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan Islam Nusantara, pesantren, NU, R20, PCINU, dan agenda perdamaian global. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama, seperti pesantren sebagai basis nilai, NU sebagai aktor diplomasi keagamaan, R20 sebagai kanal diplomasi kelembagaan, dan PCINU sebagai jaringan diplomasi akar rumput. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membaca hubungan antartema secara argumentatif untuk menunjukkan posisi strategis pesantren dalam diplomasi Islam Nusantara.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, koherensi argumentasi, dan transparansi referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas peran strategis pesantren dalam diplomasi Islam Nusantara dengan menempatkan Nahdlatul Ulama sebagai aktor keagamaan non negara yang memiliki basis sosial, kultural, dan jaringan transnasional. Pembahasan diarahkan pada empat aspek utama, yaitu pesantren sebagai basis nilai, mekanisme diplomasi Islam Nusantara, kontribusinya terhadap perdamaian global, serta tantangan dan prospeknya ke depan.

1. Pesantren sebagai Laboratorium Diplomasi Islam Nusantara

Pesantren tidak dapat dipahami semata mata sebagai lembaga pendidikan agama tradisional. Dalam sejarah sosial keagamaan Indonesia, pesantren berperan sebagai ruang pembentukan ilmu, etika, kepemimpinan, dan orientasi keberagamaan masyarakat (Burga & Damopolii, 2022; Athoillah et al., 2024). Di lingkungan pesantren, nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan melalui teks keagamaan, tetapi juga dibiasakan melalui praktik hidup bersama, penghormatan kepada guru, kedisiplinan sosial, pengabdian kepada masyarakat, dan keterbukaan terhadap tradisi lokal. Karena itu, pesantren dapat disebut sebagai laboratorium sosial tempat nilai Islam Nusantara dibentuk, diuji, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), pesantren menjadi basis utama bagi lahirnya corak keberagamaan yang moderat, inklusif, dan berakar pada kebudayaan masyarakat. Tradisi keilmuan pesantren yang bertumpu pada kitab kuning, otoritas kiai, jaringan sanad keilmuan, serta praktik bermasyarakat membentuk cara pandang keagamaan yang tidak mudah terjebak pada sikap ekstrem. Nilai *tawasut*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* menjadi prinsip penting yang menuntun pesantren dalam memahami perbedaan, menjaga keseimbangan sosial, serta merawat hubungan antarumat beragama. Nilai inilah yang kemudian menjadi fondasi etis bagi diplomasi Islam Nusantara.

Sebagai laboratorium diplomasi, pesantren bekerja melalui proses yang tidak selalu bersifat formal. Pesantren membentuk santri, alumni, dan ulama yang membawa nilai Islam Nusantara ke berbagai ruang sosial, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ketika para alumni pesantren hadir di perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga pemerintahan, komunitas diaspora, forum lintas agama, dan jaringan internasional, nilai pesantren ikut bergerak melampaui batas geografis Indonesia. Dengan demikian, diplomasi Islam Nusantara tidak hanya berlangsung melalui pertemuan resmi, tetapi juga melalui pendidikan, dakwah, keteladanan sosial, dialog, dan relasi kultural yang dibangun oleh jaringan pesantren.

Karakter diplomatik pesantren juga berakar pada sejarah dakwah Islam di Nusantara yang lebih banyak menggunakan pendekatan budaya daripada konfrontasi. Tradisi ini memperlihatkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia berlangsung melalui dialog dengan adat, seni, bahasa lokal, dan struktur sosial masyarakat (Burga & Damopolii, 2022; Damayanti, 2025). Pola dakwah semacam ini membentuk warisan penting bagi NU dalam memandang hubungan antara agama dan kebudayaan. Islam Nusantara kemudian hadir sebagai artikulasi dari pengalaman historis tersebut, yaitu Islam yang tetap berpegang pada prinsip dasar agama, tetapi mampu berdialog dengan keragaman sosial dan budaya.

Dengan posisi tersebut, pesantren dapat dipahami sebagai fondasi sosial epistemik bagi diplomasi Islam Nusantara. Pesantren menyediakan nilai, aktor, legitimasi, dan jaringan yang

memungkinkan NU tampil sebagai aktor keagamaan non negara dalam agenda perdamaian global. Peran pesantren tidak selalu tampak secara langsung dalam forum diplomatik, tetapi pengaruhnya hadir melalui cara NU membangun narasi Islam moderat, mengembangkan dialog antaragama, memperkuat jejaring diaspora, dan menampilkan Islam Indonesia sebagai model keberagamaan yang damai. Oleh karena itu, pesantren bukan hanya ruang pendidikan, melainkan juga basis strategis bagi diplomasi keagamaan yang berorientasi pada perdamaian.

2. Mekanisme Diplomasi Islam Nusantara Berbasis Pesantren

Diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren bekerja melalui beberapa jalur yang saling berhubungan. Jalur tersebut tidak hanya berlangsung dalam forum resmi, tetapi juga bergerak melalui praktik budaya, jaringan kelembagaan, komunitas diaspora, dan relasi sosial lintas negara. Dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU), pesantren menjadi sumber nilai dan kader, sedangkan organisasi NU menyediakan struktur kelembagaan yang memungkinkan nilai tersebut dikomunikasikan ke ruang nasional dan global. Karena itu, diplomasi Islam Nusantara dapat dipahami sebagai proses bertahap yang bergerak dari ruang pendidikan pesantren menuju forum masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan percakapan internasional.

Mekanisme pertama tampak dalam diplomasi budaya. Melalui tradisi keagamaan seperti *haul*, shalawat, pengajian, pendidikan lintas iman, dan dialog antarbudaya, Islam Nusantara diperkenalkan sebagai corak keberagamaan yang ramah terhadap tradisi lokal dan terbuka terhadap perbedaan. Diplomasi budaya ini penting karena masyarakat internasional sering kali mengenal Islam melalui isu konflik, kekerasan, atau ekstremisme. Kehadiran Islam Nusantara menawarkan narasi lain, yaitu Islam yang dapat hidup berdampingan dengan kebudayaan, menghargai kemajemukan, dan menempatkan perdamaian sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan (Marjani, 2023; Setiawan & Stevanus, 2023; Damayanti, 2025).

Dalam praktiknya, diplomasi budaya banyak dijalankan oleh jaringan santri, alumni pesantren, dan warga NU di luar negeri. Mereka tidak selalu hadir sebagai diplomat resmi, tetapi membawa nilai pesantren melalui aktivitas pendidikan, dakwah, forum akademik, kegiatan komunitas, serta pertemuan sehari-hari dengan masyarakat setempat. Di sinilah diplomasi Islam Nusantara bekerja secara halus. Pengaruhnya tidak selalu muncul dalam bentuk perjanjian politik, tetapi dalam pembentukan persepsi, penguatan relasi sosial, dan perluasan pemahaman bahwa Islam Indonesia memiliki tradisi damai yang dapat berdialog dengan dunia.

Mekanisme kedua adalah diplomasi kelembagaan. Bentuk ini tampak secara jelas dalam keterlibatan NU pada forum internasional, terutama *Religion of Twenty* (R20) yang diselenggarakan dalam rangkaian Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia tahun 2022. R20 menjadi momentum penting karena agama ditempatkan sebagai bagian dari percakapan global mengenai perdamaian, kemanusiaan, dan tata kelola dunia. Melalui forum ini, NU berusaha menunjukkan bahwa agama tidak harus diposisikan sebagai sumber konflik, tetapi dapat menjadi sumber nilai moral untuk mencari solusi atas persoalan global.

R20 juga memperlihatkan kemampuan NU dalam menghubungkan pesantren, otoritas keagamaan, jaringan internasional, dan forum multilateral (Suaedy et al., 2026). Nilai yang tumbuh dalam tradisi pesantren, seperti moderasi, toleransi, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, memperoleh ruang artikulasi pada tingkat global. Dengan demikian, R20 dapat dibaca sebagai kanal diplomasi kelembagaan yang memperluas jangkauan Islam Nusantara. Namun, kontribusi forum ini tetap perlu ditempatkan secara proporsional. R20 bukan

berarti menyelesaikan persoalan perdamaian global secara langsung, tetapi membuka ruang dialog, memperkuat jejaring, dan memberi pengakuan terhadap peran agama dalam agenda perdamaian.

Mekanisme ketiga adalah diplomasi akar rumput melalui jaringan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU). Jaringan ini menjadi penting karena diplomasi Islam Nusantara tidak hanya bergerak dari pusat organisasi, tetapi juga dari komunitas diaspora yang tersebar di berbagai negara. PCINU menghubungkan warga NU, santri, akademisi, pekerja migran, dan komunitas Muslim Indonesia dengan masyarakat setempat. Melalui kegiatan keagamaan, diskusi publik, kerja sama pendidikan, dan dialog lintas iman, PCINU ikut membangun citra Islam Indonesia sebagai Islam yang damai, terbuka, dan berakar pada tradisi keilmuan pesantren.

Diplomasi akar rumput memiliki keunggulan karena berlangsung dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia tidak selalu membutuhkan forum besar, tetapi bekerja melalui interaksi sosial yang berkelanjutan. Ketika komunitas NU di luar negeri menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang terbuka, menjalin komunikasi dengan komunitas lain, atau memperkenalkan tradisi pesantren kepada masyarakat internasional, mereka sedang menjalankan bentuk diplomasi yang bersifat sosial dan kultural. Dalam konteks ini, PCINU menjadi perpanjangan jaringan pesantren di ruang global.

Ketiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren bersifat berlapis. Diplomasi budaya membangun daya tarik nilai, diplomasi kelembagaan membuka ruang pengakuan global, sedangkan diplomasi akar rumput memperkuat hubungan sosial lintas negara. Ketiganya saling melengkapi dan memperlihatkan bahwa peran pesantren dalam diplomasi tidak selalu bersifat langsung, tetapi hadir melalui nilai, aktor, jaringan, dan legitimasi moral yang menopang gerakan NU di tingkat global.

3. Kontribusi terhadap Agenda Perdamaian Global

Kontribusi diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren terhadap agenda perdamaian global dapat dilihat dari kemampuannya membangun narasi keagamaan yang moderat dan inklusif. Dalam situasi ketika agama kerap dikaitkan dengan konflik identitas, radikalisme, dan ketegangan antarumat beragama (Mahrus & Itqon, 2024; Mandala et al., 2024; Sinambela, 2024), Islam Nusantara menawarkan cara pandang yang lebih dialogis. Agama tidak ditempatkan sebagai alat pemisah sosial, tetapi sebagai sumber etika untuk merawat kehidupan bersama. Pesantren berperan penting dalam membentuk narasi ini karena tradisi pendidikannya menggabungkan penguasaan teks keagamaan, pembinaan akhlak, dan kepekaan terhadap realitas sosial (Athoillah et al., 2024; Nasution et al., 2024).

Kontribusi pertama tampak dalam pembentukan kontra narasi terhadap ekstremisme. Pesantren NU memiliki tradisi keilmuan yang menolak cara beragama yang keras, eksklusif, dan mudah menyesatkan kelompok lain. Melalui pendidikan fikih, akhlak, tasawuf, dan tradisi kitab kuning, pesantren membentuk pemahaman agama yang menekankan kehati-hatian, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nilai ini penting dalam menghadapi narasi ekstrem yang sering menggunakan agama untuk membenarkan kekerasan. Dengan menawarkan pemahaman agama yang lebih damai, pesantren berkontribusi pada penguatan daya tahan masyarakat terhadap ideologi kekerasan.

Kontribusi kedua terletak pada penguatan dialog antaragama dan antarbudaya. Islam

Nusantara menempatkan perbedaan sebagai kenyataan sosial yang harus dikelola dengan adab, bukan dihapus melalui pemaksaan. Prinsip *tasamuh* memberi dasar bagi sikap toleran, sedangkan *tawazun* dan *taadul* mendorong keseimbangan serta keadilan dalam hubungan sosial. Nilai-nilai tersebut relevan bagi masyarakat global yang menghadapi meningkatnya polarisasi identitas. Dalam konteks ini, pesantren dan NU dapat menawarkan pengalaman Indonesia sebagai contoh bagaimana agama, budaya, dan kebangsaan dapat dirawat dalam satu ruang kehidupan bersama.

Kontribusi ketiga tampak dalam pembentukan model diplomasi keagamaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada negara. Diplomasi Islam Nusantara tidak bekerja melalui kekuatan politik formal semata, tetapi melalui otoritas moral, jaringan keilmuan, tradisi pesantren, dan keterlibatan masyarakat sipil. Model ini berbeda dari diplomasi yang bertumpu pada kekuasaan negara atau kepentingan geopolitik. NU dapat membangun pengaruh karena memiliki legitimasi sosial, jaringan pesantren, serta pengalaman panjang dalam mengelola keragaman keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.

Dalam kerangka tersebut, diplomasi Islam Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk *hybrid religious diplomacy*. Ia disebut *hybrid* karena memadukan diplomasi budaya, diplomasi kelembagaan, dan diplomasi akar rumput. Pesantren menyediakan basis nilai dan kaderisasi, NU menyediakan struktur organisasi dan otoritas kelembagaan, R20 menyediakan ruang artikulasi global, sedangkan PCINU memperkuat jejaring sosial transnasional. Kombinasi ini membuat diplomasi Islam Nusantara memiliki karakter khas, yaitu tidak sepenuhnya formal, tetapi juga tidak sepenuhnya informal.

Kontribusi diplomasi Islam Nusantara terhadap perdamaian global sebaiknya tidak dibaca sebagai klaim bahwa NU atau pesantren telah menyelesaikan konflik dunia. Kontribusinya lebih tepat dipahami sebagai upaya menyediakan narasi, nilai, forum, dan jaringan yang memperluas kemungkinan dialog serta kerja sama lintas agama. Dalam agenda perdamaian global, peran seperti ini tetap penting karena perdamaian tidak hanya membutuhkan perjanjian politik, tetapi juga perubahan cara pandang, pembentukan kepercayaan, dan penguatan etika hidup bersama.

Dengan demikian, pesantren NU memiliki posisi strategis dalam membangun fondasi moral bagi perdamaian. Nilai Islam Nusantara yang tumbuh dari pesantren dapat membantu memperluas percakapan global tentang agama sebagai sumber rekonsiliasi. Ketika nilai tersebut dibawa ke forum internasional, jaringan diaspora, dan kerja sama lintas iman, pesantren tidak lagi hanya menjadi lembaga lokal, tetapi bagian dari ekosistem diplomasi keagamaan yang berorientasi pada perdamaian.

4. Tantangan dan Prospek Diplomasi Islam Nusantara

Meskipun memiliki potensi besar, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah adanya resistensi dari sebagian kelompok Muslim yang memandang Islam Nusantara sebagai bentuk lokalisasi Islam yang berlebihan, atau sebagai konsep yang dikhawatirkan dapat mengaburkan universalitas ajaran Islam. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara ekspresi Islam yang berakar pada budaya lokal dan klaim universalitas Islam dalam wacana keagamaan kontemporer (Damayanti, 2025). Kritik ini sering muncul di ruang publik, terutama melalui media digital. Sebagian pihak memahami Islam Nusantara secara keliru seolah-olah ia merupakan agama baru, padahal konsep ini lebih tepat dipahami sebagai cara mengamalkan Islam dalam konteks sosial budaya Indonesia. Karena itu, NU perlu terus memperjelas bahwa Islam Nusantara tidak mengubah prinsip dasar

Islam, melainkan menegaskan cara keberagamaan yang kontekstual, damai, dan berakar pada tradisi masyarakat.

Tantangan kedua berkaitan dengan kemampuan melembagakan diplomasi berbasis pesantren. Sejauh ini, diplomasi NU dalam isu perdamaian, Islam moderat, dan dialog lintas agama sering tampil melalui peran organisasi, forum internasional, serta figur-figur keagamaan yang memiliki otoritas moral, jejaring luas, dan kapasitas komunikasi global. Namun, agar diplomasi tersebut berkelanjutan, pesantren perlu membangun sistem kaderisasi yang lebih terstruktur. Pesantren tidak hanya perlu menghasilkan ahli agama, tetapi juga santri yang memahami isu global, komunikasi lintas budaya, dialog antaragama, literasi digital, dan diplomasi perdamaian (Ridwan et al., 2024; Nasution et al., 2024; Ridwan et al., 2025; Maulidy et al., 2026;). Dengan demikian, peran diplomatik pesantren tidak berhenti pada figur tertentu, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Tantangan ketiga adalah keterbatasan dampak forum keagamaan dalam tata kelola global. Forum seperti R20 memiliki nilai simbolik dan dialogis yang penting, tetapi belum tentu memiliki mekanisme implementasi yang mengikat (Center for Shared Civilizational Values, 2022; Adlan, 2023; Suaedy et al., 2026). Karena itu, diplomasi Islam Nusantara perlu dilanjutkan dalam bentuk program yang lebih konkret, seperti pendidikan perdamaian, pertukaran santri internasional, pelatihan pemimpin agama muda, kerja sama riset, serta penguatan jaringan lintas iman di tingkat komunitas. Dengan langkah seperti ini, diplomasi tidak berhenti pada forum, tetapi bergerak menjadi kerja sosial yang lebih nyata.

Tantangan keempat adalah perkembangan media digital yang menghadirkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, media digital membuka ruang bagi pesantren dan NU untuk menyebarkan nilai Islam Nusantara kepada audiens yang lebih luas. Di sisi lain, ruang digital juga menjadi arena kontestasi narasi keagamaan, termasuk berkembangnya ujaran kebencian, polarisasi, intoleransi, dan ekstremisme (Musyarrofah & Zulhannan, 2023; Yusuf et al., 2024; Ma'arif et al., 2025). Karena itu, pesantren dan NU perlu memperkuat literasi digital agar mampu menghadirkan narasi keagamaan yang moderat, argumentatif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh generasi muda. Diplomasi Islam Nusantara pada masa depan tidak hanya berlangsung di forum internasional, tetapi juga di ruang digital yang ikut membentuk persepsi publik global.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek diplomasi Islam Nusantara tetap terbuka luas. Meningkatnya perhatian dunia terhadap peran agama dalam perdamaian memberi peluang bagi NU dan pesantren untuk memperluas kontribusinya. Pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman, posisi NU sebagai organisasi keagamaan besar, serta tradisi pesantren yang mengakar kuat menjadi modal penting untuk membangun kerja sama internasional. Jika dikelola secara serius, pesantren dapat menjadi pusat pembelajaran Islam moderat yang relevan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat global.

Prospek tersebut semakin besar apabila pesantren mampu menghubungkan kekuatan tradisi dengan kebutuhan zaman. Nilai pesantren perlu terus dirawat, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa global yang dapat dipahami oleh masyarakat lintas agama, lintas budaya, dan lintas negara. Hal ini menuntut kemampuan baru dalam komunikasi publik, riset, teknologi, diplomasi, dan kerja sama internasional. Dengan demikian, pesantren dapat tetap berakar pada tradisi, tetapi sekaligus mampu hadir dalam percakapan global secara lebih percaya diri.

Pada akhirnya, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren menunjukkan bahwa

perdamaian global tidak hanya dibangun oleh negara dan lembaga internasional. Aktor keagamaan, lembaga pendidikan, komunitas diaspora, dan jaringan masyarakat sipil juga memiliki kontribusi penting dalam membangun kepercayaan serta memperkuat etika hidup bersama. Dalam posisi inilah pesantren NU dapat dipahami sebagai laboratorium nilai, pusat kaderisasi, dan basis diplomasi keagamaan yang memberi warna khas bagi kontribusi Islam Indonesia dalam agenda perdamaian global.

5. Model Diplomasi Keagamaan Hibrida Berbasis Pesantren

Berdasarkan uraian sebelumnya, diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren dapat dipahami sebagai model diplomasi keagamaan hibrida. Model ini disebut hibrida karena tidak sepenuhnya berada dalam jalur diplomasi negara, tetapi juga tidak sepenuhnya bergerak sebagai aktivitas masyarakat sipil yang informal. Ia bekerja di antara pesantren, Nahdlatul Ulama, forum internasional, jaringan diaspora, komunitas lintas iman, dan ruang digital. Dengan demikian, diplomasi Islam Nusantara tidak hanya bergantung pada struktur negara, tetapi juga bertumpu pada otoritas moral, legitimasi keagamaan, tradisi keilmuan, dan jaringan sosial yang dibentuk dalam ekosistem pesantren.

Dalam model ini, pesantren berfungsi sebagai sumber nilai dan kaderisasi. Nilai *tawasut*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* yang hidup dalam tradisi pesantren menjadi dasar etis bagi cara NU membangun dialog, merespons perbedaan, dan menawarkan narasi Islam yang damai. Pesantren juga membentuk aktor sosial seperti kiai, santri, alumni, akademisi, dan komunitas diaspora yang membawa nilai tersebut ke berbagai ruang sosial. Karena itu, pesantren tidak hanya menjadi latar belakang historis NU, tetapi menjadi fondasi yang membuat diplomasi Islam Nusantara memiliki kedalaman moral dan kesinambungan sosial.

Nahdlatul Ulama berperan sebagai penghubung antara nilai pesantren dan ruang publik global. Melalui struktur organisasi, jaringan kelembagaan, dan legitimasi sosial yang luas, NU menerjemahkan nilai pesantren ke dalam bahasa diplomasi keagamaan. Forum seperti R20 memperlihatkan bagaimana nilai yang lahir dari tradisi Islam Nusantara dapat dibawa ke percakapan internasional tentang perdamaian, martabat manusia, dan dialog antaragama. Sementara itu, PCINU memperluas peran tersebut melalui diplomasi akar rumput yang dijalankan oleh diaspora NU di berbagai negara.

Model hibrida ini memperlihatkan bahwa diplomasi Islam Nusantara bekerja melalui beberapa lapisan yang saling menguatkan. Pesantren menyediakan basis nilai, NU menyediakan struktur kelembagaan, R20 menyediakan ruang artikulasi global, PCINU menyediakan jaringan diaspora, dan media digital menyediakan ruang penyebaran narasi. Kekuatan diplomasi ini justru terletak pada kemampuannya menghubungkan ruang lokal dan global. Nilai yang tumbuh dalam kehidupan pesantren dapat bergerak menuju forum internasional tanpa kehilangan akar kulturalnya.

Hal ini memberi sudut pandang baru terhadap peran pesantren dalam hubungan internasional. Pesantren selama ini sering dipahami sebagai lembaga pendidikan tradisional yang berperan di tingkat lokal (Rahman, 2022; Khoiriyah & Riyadi, 2023; Hasyim & Chair, 2024). Namun, dalam konteks diplomasi Islam Nusantara, pesantren dapat dilihat sebagai infrastruktur diplomasi keagamaan. Ia menghasilkan nilai, aktor, legitimasi, dan jejaring yang memungkinkan NU hadir sebagai aktor keagamaan non negara dalam agenda perdamaian global. Dengan cara ini, pesantren tidak hanya menjadi ruang transmisi ilmu agama, tetapi juga menjadi basis produksi

soft power Islam Indonesia.

Model diplomasi keagamaan hibrida juga membantu menjelaskan mengapa kontribusi pesantren terhadap perdamaian global tidak selalu tampak dalam bentuk penyelesaian konflik secara langsung. Dampaknya lebih sering bekerja melalui pembentukan narasi, perluasan jejaring, penguatan kepercayaan, pendidikan perdamaian, dan pembentukan aktor sosial yang mampu berdialog di tengah perbedaan. Dampak seperti ini memang tidak selalu mudah diukur secara cepat, tetapi memiliki arti penting dalam membangun fondasi perdamaian jangka panjang.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca pesantren sebagai infrastruktur diplomasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Pesantren tidak hanya diposisikan sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi sebagai ruang produksi nilai, pembentukan aktor, penguatan legitimasi, dan perluasan jejaring transnasional. Melalui model ini, diplomasi Islam Nusantara dapat dipahami sebagai praktik diplomasi hibrida yang bergerak dari tradisi lokal menuju agenda perdamaian global melalui NU, R20, PCINU, komunitas diaspora, dan ruang digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara berbasis pesantren merupakan bentuk diplomasi keagamaan yang bertumpu pada nilai, aktor, jaringan, dan legitimasi sosial Nahdlatul Ulama. Pesantren berperan sebagai laboratorium diplomasi Islam Nusantara karena di dalamnya nilai *tawasut*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *taadul* dibentuk, diwariskan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Melalui jaringan NU, R20, PCINU, diaspora santri, dan forum lintas agama, nilai pesantren bergerak dari ruang lokal menuju ruang global. Dengan demikian, kontribusi pesantren terhadap agenda perdamaian global tidak hanya tampak dalam forum formal, tetapi juga dalam pembentukan narasi Islam moderat, penguatan dialog antaragama, dan perluasan jejaring masyarakat sipil transnasional.

Secara teoretis, penelitian ini memberi implikasi pada pengembangan kajian diplomasi keagamaan dengan menawarkan model diplomasi keagamaan hibrida berbasis pesantren. Model ini menunjukkan bahwa diplomasi Islam Nusantara tidak sepenuhnya berada dalam jalur diplomasi negara, tetapi juga tidak sepenuhnya bersifat informal. Ia bekerja melalui kombinasi antara pesantren sebagai basis nilai dan kaderisasi, NU sebagai aktor kelembagaan, R20 sebagai ruang artikulasi global, PCINU sebagai jaringan diaspora, serta ruang digital sebagai media penyebaran narasi. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pesantren dalam bidang komunikasi lintas budaya, bahasa asing, literasi digital, studi perdamaian, dan jejaring internasional agar diplomasi Islam Nusantara tidak berhenti sebagai wacana, tetapi berkembang menjadi kontribusi yang lebih terstruktur dan berdampak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan dan analisis dokumen, sehingga belum menggali pengalaman langsung para aktor pesantren, pengurus NU, PCINU, maupun peserta forum internasional. Oleh karena itu, penelitian masa depan perlu dilengkapi dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, etnografi pesantren, atau studi komparatif terhadap beberapa pesantren yang memiliki jaringan internasional. Riset berikutnya juga dapat mengukur dampak diplomasi Islam Nusantara melalui indikator yang lebih konkret, seperti program dialog lintas agama, kerja sama internasional pesantren, aktivitas PCINU, produksi konten digital, dan keterlibatan santri dalam forum perdamaian global. Dengan demikian, kajian tentang pesantren dan diplomasi keagamaan dapat bergerak dari pembacaan konseptual menuju analisis empiris yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Adlan, M. A. (2023). Religion and Political Economy: R20 for World Economy and Peace. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 18(02), 115–143. <https://doi.org/10.21274/EPIS.2023.18.02.115-143>
- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khedhir, R. M. (2025). Using Thematic Analysis in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6(2), 100198. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- ASEAN IIDC. (2023). *ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference*. https://aseaniidc.org/2023_08_07_asean-intercultural-and-interreligious-dialogue-conference/
- Athoillah, M., Rahman, A. S., Firdaus, A. S., & Septiadi, M. A. (2024). Policies and Practices of Religious Moderation in Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 387–396. <https://doi.org/10.15575/JPI.V10I2.27543>
- Burga, M. A., & Damopolii, M. (2022). Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/JPI.V8I2.19879>
- Center for Shared Civilizational Values. (2022). *G20 Religion Forum (R20)*. <https://g20religion.org/>
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th Edition. 552.
- Damayanti, R. (2025). Islam Nusantara and Local Traditions: Role and Challenges in Indonesia's Cultural Diplomacy and International Relations. *Mimbar Agama Budaya*, 42(1), 1–13. <https://doi.org/10.15408/MIMBAR.V42I1.45750>
- Driessen, M. D. (2025). Interreligious Dialogue, Conflict Resolution and Peacebuilding: A Review. *Religions*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/REL16020150>
- GIGA. (2023). *Indonesia's Islamic Peace Diplomacy: Crafting a Role Model for Moderate Islam*. <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/indonesia-s-islamic-peace-diplomacy-crafting-role-model-for-moderate-islam>
- Hanipudin, S., Subki, T., & Khotami, A. (2023). Islam Nusantara: Karakteristik dan Nilai. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 3(02), 1–9. <https://jurnal.insima.ac.id/index.php/trq/article/view/110>
- Hasyim, Abd. W., & Chair, Abd. (2024). Transforming Pesantren: Adaptive Strategies in the Context of Educational Decentralization in Indonesia. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 9(2), 459–473. <https://doi.org/10.24042/TADRIS.V9I2.19531>
- Ilyas, M., Attamimi, M. I., Muttaqin, Moch. N., Soebahar, H., Amal, K., & Mursalim, M. (2025). Kenduri, Selamatan, Tahlilan, dan Maulid Nabi: Menakar Tradisi Lokal di Indonesia dalam Perspektif Islam. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 6(2), 287–306. <https://doi.org/10.32478/cb1j2507>
- Kemenag. (2024). *Memperkuat Pendampingan Program Kemandirian Ekonomi Pesantren*. <https://pijakan.kemenag.go.id/publikasi/memperkuat-pendampingan-program-kemandirian-ekonomi-pesantren>
- Khoiriyah, K., & Riyadi, A. A. (2023). Changes in the Tradition of Islamic Studies at Pesantren:

- A Grounded Theory Approach. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 28(1), 63–71. <https://doi.org/10.19109/TD.V28I1.17394>
- Kwuelum, C. (2024). Navigating the Complexities of Inter-Religious Peacebuilding: Implications for Theory and Practice. *Religions*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/REL15101201>
- Ma'arif, M. J., Khoiriyah, S., & Anwar, S. (2025). Pesantren and Digital Literacy: Fiqh-Based Assessment of Islamic Teachers' Competency in Strengthening Religious Moderation. *Edukasia Islamika*, 10(2), 181–209. <https://doi.org/10.28918/JEI.V10I2.12117>
- Mahrus, & Itqon, Z. (2024). Literasi Digital Islami: Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Pelajar. *RABBAYANI: Jurnal Pendidikan Dan Peradaban Islami*, 4(2), 87–98. <https://doi.org/10.32478/TENDDT32>
- Mandala, I., Witro, D., & Juraidi, J. (2024). Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 127–160. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1242>
- Marjani, G. I. (2023). The Evolution of Islam Nusantara: Tracing the Origins and Examining Contemporary Manifestations of Pluralism and Tolerance. *International Journal of Nusantara Islam*, 11(1), 121–135. <https://doi.org/10.15575/IJNI.V11I1.27813>
- Maulidy, Moh. I., Suharto, B., & Wibowo, W. (2026). Model Empat Pilar Inovasi dalam Sinergitas Kurikulum Pesantren dan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pesantren Luhur Sabilussalam. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 278–286. <https://doi.org/10.54259/diajar.v5i1.6884>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *SAGE Publications, Inc*, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Musyarrofah, U., & Zulhannan. (2023). Religious Moderation in the Discourse of Nahdlatul Ulama's Dakwah in the Era of Industry 4.0. *Millah: Journal of Religious Studies*, 22(2), 409–434. <https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL22.ISS2.ART5>
- Muttaqin, F. F., Munandar, A., Susanti, E., Gutierrez, Y. H. R., & Riaz, F. (2025). *Cultural Diplomacy in Global Governance: Reimagining Indonesia's Soft Power Through Nahdlatul Ulama's Islam Nusantara Paradigm*. <https://journal.uinjkt.ac.id/indo-islamika/article/view/47006>
- Nasution, S., Asari, H., & Al-Rasyid, H. (2024). Kitab Kuning and Religious Moderation: A Study on State Islamic Universities in Indonesia. *Journal of Al-Tamaddun*, 19(2), 73–88. <https://doi.org/10.22452/JAT.VOL19NO2.5>
- Nubowo, A. (2023). Promoting Indonesian Moderate Islam on the Global Stage: Non-State Actors' Soft Power Diplomacy in the Post-New Order Era. *Muslim Politics Review*, 2(2), 238–283. <https://doi.org/10.56529/MPR.V2I2.204>
- Odak, S. (2024). Why Do They Not Do More? Analyzing Peacebuilding Actions of Religious Leaders during and after Violent Conflicts. *Religions* 2024, Vol. 15, 15(1). <https://doi.org/10.3390/REL15010116>
- Pew Research Center. (2024). *5 Facts about Muslims and Christians in Indonesia*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/03/28/5-facts-about-muslims-and-christians-in-indonesia/>
- Putra, A. E. (2020). Islam Nusantara dan Apresiasi Atas Kebudayaan Lokal. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 15(1), 49–68. <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V15I1.6016>
- Rahman, B. A. (2022). Islamic Revival and Cultural Diversity: Pesantren's Configuration in Contemporary Aceh Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), 201–229. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V12I1.201-229>
-

- Ridwan, Hanan, D., & Astuti, T. S. (2024). Examining New Public Diplomacy and Interfaith Dialogue in Indonesia: Cases of World Peace Forum (WPF) and Religion Twenty (R20). *Studia Islamika*, 31(3), 477–510. <https://doi.org/10.36712/sdi.v31i3.38376>
- Ridwan, R., Farikhah, K., & Yanuri, Y. R. (2025). Engaging Non-State Actor in Second-Track Diplomacy: A Study of Nahdlatul Ulama in Promoting Moderate Islam. *Al-Qalam*, 31(1), 209–223. <https://doi.org/10.31969/ALQ.V31I1.1629>
- Salma. (2023). *UGM Center for Security and Peace Studies and PBNU Launch R20 Summit Proceedings*. <https://ugm.ac.id/en/news/ugm-center-for-security-and-peace-studies-pbnu-launch-r20-summit-proceedings/>
- Satu Data Indonesia. (2024). *Jumlah Pondok Pesantren*. <https://data.go.id/dataset/dataset/jumlah-pondok-pesantren-menurut-tipe>
- Schliesser, C. (2024). Religion Matters: Religion and the Sustainable Development Goals (SDGs). *Religion*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/REL15030337>
- Setiawan, D. E., & Stevanus, K. (2023). Significance of Islam Nusantara Values in an Indonesian Multicultural Society. *Journal of Al-Tamaddun*, 18(1), 203–214. <https://doi.org/10.22452/JAT.VOL18NO1.17>
- Sinambela, N. M. (2024). *BNPT-Kemkomdigi “Take Down” 180.954 Konten Radikalisme di Media Sosial*. <https://www.antaranews.com/berita/4545666/bnpt-kemkomdigi-take-down-180954-konten-radikalisme-di-media-sosial>
- Song, X., & Utama, V. R. (2025). From Indonesia to China: The Evolving Landscape of Santri Diplomacy. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.47776/GFPFW650>
- Suaedy, A., Ridwan, & Huda, A. N. (2026). Nahdlatul Ulama, R20, and the Quest for a Global Peace. *Islam, Conflict, and Political Transformation in Southeast Asia*, 263–277. https://doi.org/10.1007/978-981-95-5473-7_13
- Syamsurijal, S., Jati, W. R., & Halimatusa’diah, H. (2022). Religious Moderation Within Islam of the Archipelago: Lesson Learnt from Nine Islamic Saints. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3), 361–378. <https://doi.org/10.14203/JMB.V24I3.1804>
- Utama, V. R. (2024). Nahdlatul Ulama’s Strategic Role in Shaping Indonesian Foreign Policy. *Muslim Politics Review*, 3(2), 405–437. <https://doi.org/10.56529/MPR.V3I2.312>
- Widadi, W., & Razi, F. (2025). Islam dan Perubahan Kebudayaan Nusantara. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 331–353. <https://doi.org/10.33477/jsi.v14i2.11797>
- Yusuf, M. Z., Nahar, M. H., Abror, H. M., & Renaldi, M. H. (2024). Digital Strategies for Promoting Religious Moderation: The Role of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama on Social Media. *International Journal of Nusantara Islam*, 12(2), 116–130. <https://doi.org/10.15575/IJNI.V12I2.40448>
-